

INFLASI, KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA (2013-2022)

DITERIMA

Agustus 2023

DIREVISI

September 2023

DISETUJUI

Oktober 2023

Diki Alviqwe Wibowo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstract: Inflation and unemployment are thorny problems that are always faced by the State of Indonesia related to the lack of quality of economic growth. The Phillips curve which describes the tradeoff between inflation and unemployment does not apply in Indonesia. This type of research is quantitative with descriptive statistics used to analyze data by describing or describing the data that has been collected as it is without intending to make conclusions. The research results show that Indonesia's poverty rate and open unemployment rate for the 2013-2022 period are highest in 2013 while inflation, poverty rate and Indonesia's open unemployment rate for the 2013-2022 period are in 2021, but there is a difference in 2021 the open unemployment rate became the highest unemployment compared to the unemployment rate in the period 2013-2022.

Keywords: Inflation; poverty; unemployment; Indonesia.

Abstrak: Kota Malang sebagai kota pendidikan adalah kota kedua dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Timur. Masalah yang ditemukan di Kota Malang adalah tingginya kemiskinan. Implikasi masalah kemiskinan kemudian mengarah pada masalah sosial berupa maraknya pengemis dan pemulung. Keberadaan pengemis dan pemulung sebagai bagian dari salah satu kategori dalam PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) hadir di tengah-tengah berjalannya program penanggulangan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan pengaruh pendidikan, penghasilan, jenis kelamin, status perkawinan, asal daerah, dan jumlah tanggungan keluarga terhadap keputusan masyarakat miskin sebagai pengemis atau pemulung di Kota Malang. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode analisis regresi logistik biner. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 72 responden. Setelah dilakukan uji regresi logistik, ditemukan hasil bahwa penghasilan, jenis kelamin, dan status perkawinan menjadi faktor yang berpengaruh dan sisanya tidak berpengaruh.

Kata Kunci: Pengemis; Pemulung; Kemiskinan

**INDEKSASI**

Google Scholar

PENULIS**KORESPONDENSI**

Diki Alviqwe Wibowo

Email:

dikialviqwe31@gmail.com

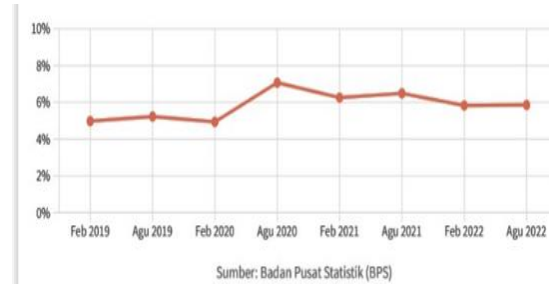
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas
Brawijaya, Indonesia**Cite this as:**Wibowo, D. A..2023. Inflasi, Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran di Indonesia. Journal of Development Economic and Social Studies. Volume 02, Number 4, Pages 858-866. Universitas Brawijaya. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.12>

PENDAHULUAN

Inflasi dan pengangguran adalah masalah jangka pendek dalam perekonomian. Inflasi sendiri didefinisikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Peningkatan hanya pada satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi kecuali jika kenaikan tersebut meluas ke (atau menyebabkan kenaikan harga) produk lain (Badan Kebijakan Fiskal et al., 2022). Semua negara di dunia selalu menghadapi masalah inflasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa inflasi yang terjadi di negara tersebut dapat dijadikan sebagai indikator baik buruknya perekonomian negara tersebut. Di negara-negara dengan ekonomi yang baik, tingkat inflasi adalah 2 sampai persen per tahun. Inflasi rendah dikatakan antara 2 % dan 0 % (Manullang, 1993). Inflasi yang berfluktuasi antara 7 dan 10 persen dianggap sebagai inflasi tinggi.

Inflasi dan pengangguran merupakan dua indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian suatu negara. Hubungan antara kedua variabel ini merupakan isu ekonomi makro yang banyak dibahas dalam praktik ekonomi. Dalam beberapa dekade terakhir, telah banyak penelitian yang menganalisis hubungan antara inflasi dan pengangguran baik secara teoritis maupun praktis. Pentingnya hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran juga mempengaruhi bauran kebijakan masing-masing negara untuk mencapai keadaan ekonomi yang lebih baik. Pengangguran merupakan masalah yang cukup mendasar dalam perekonomian nasional baik di negara maju maupun negara berkembang. Partisipasi angkatan kerja yang rendah merupakan masalah utama, terutama di negara-negara dengan populasi besar.

Pengangguran merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Jika ditelusuri dengan melihat jumlah pengangguran yang terjadi pada tahun 2021 menuju tahun 2022 di Indonesia, terjadi penurunan 0,35 juta orang.



(Sumber: BPS, 2022)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus tahun ini sebesar 5,86 persen. Angka itu menurun dari 6,49 persen pada Agustus tahun lalu. Sedangkan jika dibandingkan temuan Februari 2022, rasionya naik 0,03 persen. Meski terus menunjukkan tren membaik, tetapi capaian Agustus lalu belum mampu menyamai catatan sebelum pandemi Covid-19. Data menunjukkan bahwa TPT Agustus 2019 sebesar 5,23 persen.

Momentum pemulihan ekonomi terus berlanjut di berbagai negara di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Perlambatan ekonomi dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi seluruh dunia, terutama di Cina. Apalagi, perang dagang antara China dan Amerika Serikat menimbulkan risiko signifikan yang dapat mengancam pertumbuhan ekonomi (Priyono dan Ismail, 2012). Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang baik, negara-negara perlu mempertimbangkan berbagai variabel ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran adalah tiga variabel ekonomi makro yang saat ini berada dalam masalah besar.

KAJIAN PUSTAKA

Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu diantaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran (Mankiw, 2006). Selain itu dengan tingkat pengangguran, dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat negara tersebut. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta

penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya (Putro, 2013), Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Kondisi pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal yang dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Kajian Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus (Sukirno, 2006). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 2011). Kenaikan harga barang-barang itu tidak harus dengan persentase yang sama. Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus menerus dan kenaikan harga yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa (Pohan, 2008). Bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak secara bersamaan.

Namun inflasi pasti merupakan kenaikan harga umum barang-barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar, bukanlah merupakan inflasi (Putro, 2013). Menurut Milthon Friedman, inflasi merupakan sebuah fenomena moneter yang selalu terjadi dimanapun dan tidak dapat dihindari. Inflasi dikatakan sebagai fenomena moneter hanya jika terjadi peningkatan harga yang berlangsung secara cepat dan terus-menerus. Pendapat ini disetujui oleh banyak ekonom dari aliran monetaris (Mishkin, 2004).

Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur laju inflasi selama satu periode tertentu, diantaranya adalah :

1. Indeks Harga Konsumen (*Consumers Price Index*)

Indeks harga konsumen adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga barang

dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar. Menurut Bank Indonesia inflasi diukur dengan IHK di Indonesia di kelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose* (COICOP), yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan dan olah raga, dan kelompok transportasi dan komunikasi

2. Indeks Perdagangan Besar (*Wholesale Price Index*)

Indeks harga perdagangan besar atau yang lebih dikenal dengan indeks harga produsen melihat inflasi dari sisi produsen dan lebih menitikberatkan pada sejumlah barang di tingkat perdagangan besar. Ini berarti bahwa harga bahan mentah, bahan baku dan bahan setengah jadi masuk dalam perhitungan. Ukuran yang dipakai dalam menghitung IHP adalah penjualan.

3. GNP Deflator

Deflator GNP mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam perhitungan GNP. Deflator GNP diperoleh dengan membagi GNP nominal (atas dasar harga berlaku) dengan GNP riil (atas harga konstan) dan dengan demikian dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari seluruh komponen GNP (konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor netto) (Nugroho, 2012)

Kemiskinan

Menurut Mubyarto (2004) bahwa: “Kemiskinan di gambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok atau kebutuhan hidup minimum yaitu sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Menurut Lincoln Arsyad (2010), ukuran indikator kemiskinan antara lain :

1. Tingkat konsumsi beras perkapita per tahun. Dan Tingkat pendapatan
2. Indikator kesejahteraan rakyat.

Menurut publikasi PBB tahun 1961, yang berjudul *internatonal definition and measurement of levels of living: an interim guide* dikemukakan ada sembilan komponen kesejahteraan, antara lain: kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan. UNDP (*United Nation Development Program*) memperkenalkan indeks kemiskinan manusia. Menurut UNDP, bahwa tolak ukur kemiskinan dari seseorang adalah jika dia tidak mampu menjangkau (atau bahkan tidak mempunyai akses) terhadap sarana publik dasar dan tingkat kualitas hidup mereka sendiri rendah, bukan berapa banyak pendapatan per dolar perkapita yang mampu mereka raih setiap harinya. (Arsyad, 2010).

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Konsep lingkaran kemiskinan menganggap bahwa: ketidakmampuan untuk mengerahkan tabungan yang cukup, kurangnya keahlian masyarakat yang relatif masih rendah, dan kurangnya faktor pendorong untuk kegiatan penanaman modal, adalah merupakan tiga faktor utama yang menghambat proses pembentukan modal dan pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang.

Pengangguran

Dalam definisi ekonomi, pengangguran tidak identik dengan tidak (mau) bekerja. Seseorang dikatakan menganggur apabila orang tersebut ingin bekerja dan telah berusaha mencari pekerjaan, namun tidak mendapatkannya. Dalam ilmu kependudukan (demografi), orang yang mencari pekerjaan termasuk dalam kategori kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Berdasarkan kategori usia, usia angkatan kerja adalah 15-64 tahun. Tetapi tidak semua orang yang berusia 15-

tahun dihitung sebagai angkatan kerja. Penduduk yang dihitung sebagai angkatan kerja adalah penduduk usia 15-64 tahun dan sedang mencari kerja, sedangkan yang tidak mencari kerja apakah karena mengurus keluarga atau sekolah, tidak termasuk angkatan kerja. Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak/belum mendapatkan pekerjaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menekankan analisisnya pada data-data numerik (berupa angka) yang diolah dengan metode statistik tertentu. Analisis data menggunakan Statistik Deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan rata-rata tingkat inflasi, kemiskinan dan pengangguran terbuka di Indonesia pada kurun waktu 2010-2022.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang telah tersedia dalam bentuk angka. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series. Data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu wilayah sedangkan data cross section adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap inflasi Kemiskinan dan Tingkat pengangguran terbuka. Data *time series* sebanyak 10 tahun dari tahun 2013-2022. Sumber Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan ekonomi merupakan tujuan penting di negara berkembang, termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi ini tidak hanya terkait dengan pertumbuhan, tetapi juga dengan kesejahteraan dan jaminan sosial, serta kualitas sumber daya alam dan manusia. masalah pembangunan ekonomi tidak jauh dari masalah pengangguran dan kemiskinan. Berikut disajikan hasil analisis dari perbandingan

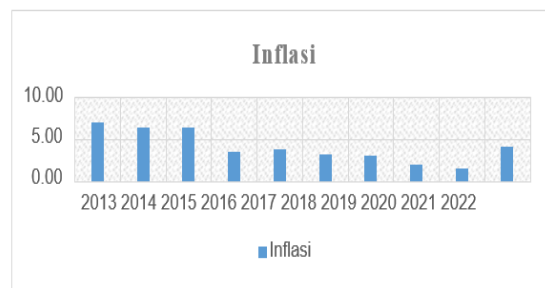
inflasi, kemiskinan, dan pengangguran terbuka yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 10 tahun periode 2012-2022 sebagai berikut.

Tabel 1. Data Inflasi, kemiskinan dan Tingkat Pengangguran terbuka Indonesia 2013-2022

Data	Tahun	Inflasi	Kemiskinan	Pengangguran Terbuka
1	2013	6,97	11,42	6,03
2	2014	6,42	11,11	5,82
3	2015	6,38	11,18	6,00
4	2016	3,53	10,78	5,56
5	2017	3,81	10,38	5,42
6	2018	3,20	9,74	5,20
7	2019	3,03	9,32	5,11
8	2020	2,04	9,99	6,01
9	2021	1,56	9,93	6,38
10	2022	4,09	9,54	5,85

Sumber: BPS (2022), diolah.

Hasil analisis inflasi tahunan di Indonesia tahun 2013-2022 dijelaskan sebagai berikut.

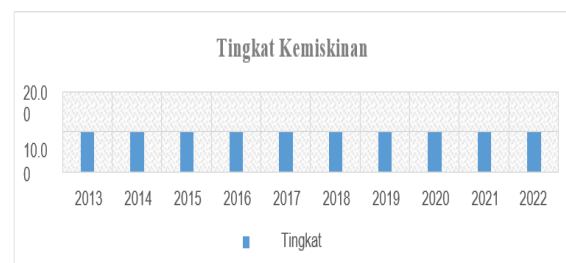


Sumber: BPS (2022), diolah.

Dari data di atas, mengacu ke periode 2013-2022, rata-rata inflasi tahunan umum Indonesia selama 10 tahun adalah 4,04% per tahun. Menggunakan kalkulasi akumulasi penurunan nilai setelah inflasi 10 tahun, nilai uang secara akumulatif naik 48,24%. inflasi tahun 2022 di seluruh wilayah diperkirakan sedikit lebih tinggi dari batas atas kisaran sasaran. Secara umum, proyeksi tersebut disebabkan oleh adanya gangguan sisi supply akibat kenaikan harga energi dan pangan global, serta dinamika cuaca yang berisiko mengganggu produktivitas pertanian, di tengah

perbaikan permintaan masyarakat. Dalam upaya mengendalikan tekanan inflasi ke depan. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mendorong bank sentral untuk menaikkan suku bunga, yang mengakibatkan kontraksi atau pertumbuhan negatif di sektor riil. Selain itu, akan berdampak pada bertambahnya pengangguran. Dalam jangka pendek, kenaikan inflasi menandakan pertumbuhan ekonomi, namun dalam jangka panjang, kenaikan inflasi yang tajam dapat berdampak negatif. Tingginya tingkat inflasi pada tahun membuat harga barang dalam negeri relatif mahal dibandingkan dengan harga barang impor. Kurangnya persaingan harga produk dalam negeri menyebabkan rendahnya permintaan produk dalam negeri. Produksi akan berkurang karena beberapa pengusaha akan mengurangi produksi. Turunnya produksi menyebabkan sejumlah pekerja kehilangan pekerjaan, meningkatkan pengangguran.

Hasil analisis kemiskinan yang terjadi di Indonesia tahun 2013-2022 dijelaskan sebagai berikut.



Sumber: BPS (2022), diolah.

Penduduk miskin Indonesia per Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang. Jumlah ini turun dari September 2021 yang masih 26,5 juta orang. Meski jumlahnya menurun penduduk miskin masih lebih tinggi dibanding tahun 2018 dan 2019 sebelum pandemi. Namun angka kemiskinan yang terjadi pada Maret 2022 masih lebih tinggi dibanding sebelum pandemi Covid-19.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini lebih rendah dibandingkan sepuluh tahun yang lalu, seperti yang terlihat pada grafik. Dibandingkan Maret 2013, data BPS menunjukkan bahwa jumlah ini menurun

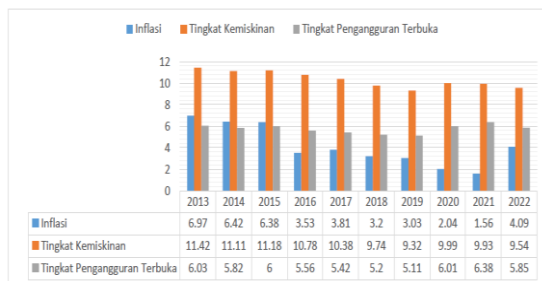
sekitar 3,8 juta orang. Berdasarkan kelompok penduduk, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 11,82 juta orang atau setara dengan 7,5%. Jumlah ini turun dari 11,82 juta orang pada September 2021 atau 7,60%. Sementara itu, 14,34 juta orang atau 12,29% penduduk miskin tinggal di pedesaan. Jumlah ini juga turun dari 14,64 juta orang pada September 2021 atau 12,53%.

Hasil analisis tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Indonesia tahun 2013-2022 dijelaskan sebagai berikut.

Sumber: BPS (2022), diolah.

Tingkat Pengangguran Indonesia dilaporkan sebesar 5.86 % pada 2022. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 6.49 % untuk 2021. Data Tingkat Pengangguran Indonesia diperbarui tahunan, dengan rata-rata 5.94 % dari 1984 sampai 2022, dengan 39 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 11.24 % pada 2005 dan rekor terendah sebesar 1.62 % pada 1984.

Hasil analisis inflasi, kemiskinan dan pengangguran terbuka yang terjadi di Indonesia tahun 2013-2022 dijelaskan sebagai berikut.



Sumber: BPS (2022), diolah.

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Inflasi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka Indonesia kurun waktu 2013-2022 tertinggi terdapat pada tahun 2013 sedangkan inflasi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka Indonesia kurun waktu 2013-2022 terdapat pada tahun 2021, namun terdapat perbedaan pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka menjadi pengangguran tertinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran pada kurun waktu 2013-2022. Sejalan dengan hal tersebut Studi Bank Dunia (Juni 2022) menyatakan bahwa kenaikan harga komoditas dalam negeri

yang dipicu oleh pergerakan harga komoditas global diperkirakan akan meningkatkan angka kemiskinan sebesar 0,2 poin persentase.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Inflasi	10	1.56	6.97	4.1030	1.88199
Tingkat Kemiskinan	10	9.32	11.42	10.3390	.74469
Tingkat Pengangguran Terbuka	10	5.11	6.38	5.7380	.40496
Valid N (listwise)	10				

Sumber: Data analisis SPSS, diolah (2022)



Tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari satu tahun ke tahun berikutnya secara signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran sebesar -1,57 persen. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa jika tingkat pertumbuhan agregat atau setiap sektor per kapita meningkat sebesar 1 persen, maka tingkat pengangguran turun sebesar 1,57 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi secara total atau per sektor per kapita di Indonesia juga menunjukkan daya beli sebesar orang. Kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah membaik. Perbaikan ekonomi ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil bangkit kembali setelah mendapat tekanan dari Covid-19 dalam beberapa kuartal terakhir.

Pertumbuhan ekonomi per kapita masing-masing sektor meningkat, pembelian masyarakat juga meningkat. Meningkatnya daya beli masyarakat juga akan menyebabkan tingkat inflasi. Didapatkan kenyataan bahwa meskipun banyak negara bisa tumbuh dengan tingkat yang tinggi, namun sebagian besar masyarakatnya tetap berada dalam kemiskinan. Kemiskinan tersebut diiringi tidak meratanya distribusi pendapatan dan juga tingkat pengangguran yang tinggi, di beberapa negara

bahkan diikuti dengan kematian akibat kelaparan yang parah (Hakim, 2002:210).

Tujuan negara membangun adalah untuk kesejahteraan rakyat, maka masalah pengangguran yang tinggi merupakan kondisi yang sangat tidak dikehendaki oleh suatu negara di manapun (Mankiw, 2006). Inflasi dan pengangguran adalah dua masalah ekonomi yang utama yang sering dihadapi oleh masyarakat suatu negara. Jika masalah inflasi dan pengangguran tidak terkendali, maka kedua masalah tersebut dapat mewujudkan efek buruk baik yang bersifat ekonomi, sosial, politik serta lingkungan dan budaya. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin ditimbulkan oleh kedua masalah tersebut, secara sederhana yakni secara ekonomi makro diperlukan berbagai kebijakan ekonomi yang komprehensif. Dalam teori kurva Phillips, pengangguran yang tinggi memang akan cenderung mengurangi inflasi. Namun yang menarik di Indonesia fenomena yang sering terjadi adalah ketika pengangguran tinggi tingkat inflasi juga masih tetap tinggi (Priyono dan Ismail, 2012).

Padahal, tujuan yang selalu dikehendaki untuk kedua masalah tersebut adalah rendah. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa inflasi yang terjadi pada suatu negara dapat digunakan sebagai indikator baik buruknya perekonomian suatu negara. Bagi negara yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2 sampai 4 persen per tahun (Priyono dan Ismail, 2012). Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4 persen dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Tingkat inflasi yang berkisar antara 7 sampai 10 persen dikatakan inflasi yang tinggi. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebut hiperinflasi (*hyper inflation*) (Nuzulaili, 2022).

Hubungan terbalik (*tradeoff*) antara pengangguran dan inflasi disebut kurva Phillips. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin rendah tingkat inflasi upah (Maichal, 2012). Dalam hal ini pengangguran sebagai *output* dan menerjemahkan inflasi sebagai perubahan harga. Kondisi dimana secara simultan pengangguran tinggi dan diikuti inflasi yang tinggi disebut sebagai stagflasi (Yelwa et al., 2015). Jika hal tersebut dikaitkan dengan adanya Kurva Phillips menunjukkan bahwa di negara Indonesia hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran bukan lagi sebuah tradeoff

melainkan berjalan searah, artinya inflasi yang tinggi juga diikuti dengan tingkat pengangguran yang tinggi.

Inflasi sebagai bentuk kenaikan harga-harga di semua sektor, maka perusahaan-perusahaan akan mengambil kebijakan mengurangi biaya untuk memproduksi barang atau jasa dengan cara mengurangi pegawai atau tenaga kerja. Akibatnya, angka pengangguran yang tinggi tidak dapat dihindari dan berakibat perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Oleh karena itu, inflasi sangat berkaitan erat dengan tingkat pengangguran.

Adanya kenaikan harga-harga atau inflasi pada umumnya disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi. Hubungan antara perubahan tingkat pengangguran dengan inflasi di Indonesia menyimpang dari teori kurva Phillips. Alasan lainnya adalah bahwa dalam kurva Phillips hanya terjadi dalam jangka pendek tetapi tidak dalam jangka panjang. Karena pada jangka pendek masih berlaku harga kaku "*sticky price*" sedangkan pada jangka panjang berlaku harga fleksibel. Dengan kata lain pengangguran akan kembali pada tingkat alamiahnya sehingga hubungan yang terjadi antara inflasi dan pengangguran akan positif.

Inflasi yang meningkat dapat memberi dampak yang buruk bagi ekonomi negara dimana hal tersebut akan menyebabkan pengangguran menurun. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun mengalami penurunan inflasi dengan rata-rata sebesar 4,10, penurunan kemiskinan dengan rata-rata sebesar 10,34, pengangguran mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 10,34. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif dengan perubahan inflasi dan tingkat pengangguran pada kurva Phillips. Inflasi pada Banten terjadi dikarenakan meningkatnya nilai energi dunia dan tarif nasional, dimana adanya faktor geopolitik aksi militer Rusia terhadap Ukraina. Sedangkan pengangguran terjadi penurunan dikarenakan semakin banyaknya industri yang berkembang di Indonesia seperti Sektor UMKM.

Faktor lain yang mempengaruhi pengangguran terbuka adalah kemiskinan atau kurangnya tunjangan sosial. Menurut BPS

(2020), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan bukan makanan, diukur dari sisi pengeluaran. Oleh karena itu, penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan. Hubungan yang tampak antara kemiskinan dan pengangguran terbuka adalah banyak peneliti yang menyebut kedua variabel ini sebagai masalah kembar, karena banyak negara dengan tingkat pengangguran tinggi akan diikuti oleh tingkat kemiskinan yang tinggi. Peningkatan pengangguran yang tajam, upah minimum yang rendah, dan kualitas pekerjaan yang buruk akan menyebabkan peningkatan tingkat kejahatan, peningkatan tingkat migrasi (migrasi dari pedesaan ke perkotaan) dan penurunan standar hidup (Muhammad dan David, 2019)

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 140,15 juta orang, naik 1,93 juta orang dibanding Agustus 2020. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,03 persen poin.

- Penduduk yang bekerja sebanyak 131,05 juta orang, naik sebanyak 2,60 juta orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan (0,65 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,43 persen poin).
- Sebanyak 77,91 juta orang (59,45 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 1,02 persen poin dibanding Agustus 2020.
- Persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,03 persen poin, sementara persentase setengah pengangguran turun 1,48 persen poin dibandingkan Agustus 2020.
- Jumlah pekerja komuter pada Agustus 2021 sebanyak 7,34 juta orang, naik sebesar 330 ribu orang dibanding Agustus 2020.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 6,49 persen, turun 0,58 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020.
- Terdapat 21,32 juta orang (10,32 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (1,82 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (700

ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (1,39 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (17,41 juta orang).

Kebijakan lain yang sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat adalah kebijakan menjaga harga jual energi rumah tangga meskipun dengan konsekuensi peningkatan subsidi energi dan pengeluaran offset. APBN telah mengambil peran penting sebagai shock absorber dengan meredam meningkatnya tekanan harga komoditas dunia. Jika tekanan harga komoditas global dibiarkan mempengaruhi harga domestik, inflasi Indonesia kemungkinan besar akan setinggi inflasi banyak negara. Efeknya adalah peningkatan angka kemiskinan penduduk. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk menjaga harga jual energi rumah tangga sangat penting untuk mencegah angka kemiskinan penduduk meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengangguran terbuka Indonesia Kurun Waktu 2013-2022 tertinggi terdapat pada tahun 2013 sedangkan Inflasi, Tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengangguran terbuka Indonesia Kurun Waktu 2013-2022 terdapat pada tahun 2021, namun terdapat perbedaan pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka menjadi pengangguran tertinggi dibandingkan dengan dengan tingkat pengangguran pada kurun waktu 2013-2022.

Saran

Pemerintah Indonesia dalam hal kebijakan harus mampu memberikan dukungan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya nyata yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan perluasan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain terkait untuk mengoptimalkan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu dengan lebih mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia.

Implikasi

Inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia yang menyebabkan peningkatan dalam aspek

kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah harus mengatasi hal tersebut dengan kebijakan moneter dan fiscal yang ketat guna mengontrol Jumlah Uang Beredar (JUB).

Pertumbuhan ekonomi signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang didampingi pembangunan ekonomi, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan yang membuat Indonesia mengalami pengurangan dalam hal kemiskinan.

Upah minimum yang ditetapkan oleh provinsi yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka tetapi berpengaruh negatif harus dikaji oleh pemerintah. Penerapan UMK yang maksimal belum tentu dijalankan oleh perusahaan. Maka perlu pengawasan cukup ketat oleh Pemerintah Indonesia terhadap setiap perusahaan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan dua diantara sekian banyak variabel terkait pengangguran yang dapat menjadi proxy penentu kemudahan aksesibilitas serta sarana dan prasarannya. Diharapkan peneliti selanjutnya mampu menambahkan variabel proxy lain yang dapat lebih menggambarkan stabilitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.
- Bagus Setiawan, N. (2015). *An Analysis Of Causality Between Inflation Rate And Unemployment Rate In East Java International Program In Economics Faculty Of Economics And Business University Of Brawijaya Malang*.

- Boediono. (2011). *Ekonomi Makro, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*. BPFE.
- Itu. (2016). *Measuring the Information Society Report*.
- Maichal. (2012). Kurva Phillips Di Indonesia. *In Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 13, Issue 2).
- Mankiw, N. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro (Ketiga) (ketiga)*. Salemba Empat.
- Manullang. (1993). *Pengantar Teori Ekonomi Moneter*. Ghalia Indonesia.
- Mishkin, F. S. (2004). *The Economics of Money, Banking and Financial Markets (Seventh Edition)*. Pearson Addison.
- Nuzulaili, D. D. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB Dan UMP Terhadap Pengangguran Di Pulau Jawa 2017-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 06(02), 228–238.
- Pohan, A. (2008). *Potret kebijakan Moneter Indonesia. Rajawali Pers*.
- Priyono dan Ismail. (2012). BUKU-TEORI-EKONOMI_PDF.
- Putro, A. dan S. H. (2013). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi Dan Beban/Tanggungans Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kota Magelang Periode Tahun 1990 – 2010. *Diponegoro Journal Of Economics*, 02(03), 1–14.
- Rousseau, P. L. & X. S. (2007). *Banks, Stock Markets, and China's 'Great Leap Forward'*. *Emerging Markets Review*, 18(03), 206–217.
- Sukirno, S. (2006). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Grafindo Persada.
- Yelwa, M., David, O. O. K., & Omoniyi, A. E. (2015). Analysis of the Relationship between Inflation, Unemployment and Economic Growth in Nigeria: 1987-2012. *Applied Economics and Finance*, 2(3). <https://doi.org/10.11114/aef.v2i3.943>